

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG  
MENOLAK MEMBUAT AKTA KARENA BERTENTANGAN  
DENGAN PRINSIP ETIKA PROFESI  
(STUDI KASUS NOTARIS KOTA TANJUNGPINANG)**

Oleh  
**Dita Aprilia**  
**Nim. 2205040172**

**ABSTRAK**

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktik kenotariatan, Notaris kerap dihadapkan pada permohonan pembuatan akta yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip etika profesi. Kondisi ini menempatkan Notaris pada posisi dilematis antara memenuhi permintaan klien dan menjaga integritas jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang menolak membuat akta karena bertentangan dengan prinsip etika profesi, dengan studi kasus Notaris di Kota Tanjungpinang. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada Notaris yang melakukan penolakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan perlindungan preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Notaris untuk membuat akta yang tidak memenuhi syarat hukum dan etika merupakan tindakan yang sah berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kode Etik Notaris. Penolakan tersebut justru berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah lahirnya akta cacat hukum serta perlindungan represif bagi Notaris dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Notaris yang menolak membuat akta demi menjaga kepastian hukum dan martabat profesi berhak memperoleh perlindungan hukum secara normatif dan institusional.

Kata Kunci: Notaris, Penolakan Akta, Etika Profesi, Perlindungan Hukum, UUJN.

**LEGAL PROTECTION FOR NOTARIES WHO REFUSE TO DRAW  
UP DEEDS DUE TO CONFLICTS WITH PROFESSIONAL  
ETHICAL PRINCIPLES**  
*(A Case Study of Notaries in Tanjungpinang City)*

By  
**Dita Aprilia**  
**Nim. 2205040172**

**ABSTRACT**

*Notaries, as public officials, are authorized to draw up authentic deeds that ensure legal certainty and protection for the parties involved. However, in notarial practice, Notaries are often confronted with requests to prepare deeds that conflict with legal provisions and professional ethical principles. This situation places Notaries in a dilemma between fulfilling clients' requests and maintaining professional integrity. This study aims to analyze the forms of legal protection for Notaries who refuse to draw up deeds due to conflicts with professional ethical principles, with a case study of Notaries in Tanjungpinang City. The research problem focuses on how legal protection is provided to Notaries who exercise such refusal. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches. The theoretical framework applied is the legal protection theory proposed by Satjipto Rahardjo, emphasizing preventive and repressive legal protection. The results indicate that a Notary's refusal to draw up a deed that fails to meet legal and ethical requirements constitutes a lawful act under the Notary Law, the Indonesian Civil Code, and the Notary Code of Ethics. Such refusal functions as preventive legal protection by preventing the creation of legally defective deeds and as repressive legal protection by safeguarding Notaries from unfounded legal claims. This study concludes that Notaries who refuse to draw up deeds to uphold legal certainty and professional dignity are entitled to normative and institutional legal protection.*

*Keywords: Notary, Refusal of Deed, Professional Ethics, Legal Protection, UUJN.*